



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Zulkifli bin Sudirman, NIK. 7406194205000001, tempat dan tanggal lahir Bone, 02 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

Elsa Selvianti binti Sudirman, NIK. 7406196308050001, tempat dan tanggal lahir Poleondro, 23 Mei 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Suhardiman yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Bapak Mustaring;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Jamaluddin dan Bapak Pala, dengan Mas Kawin berupa 10 Pohon Kelapa dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2022 di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tengah, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang Tengah;

11. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Honorer sementara Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga tidak bekerja dan tidak memiliki gaji/pendapatan yang tetap sehingga Pemohon termasuk keluarga ekonomi tidak mampu di Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) Nomor: 243/SKTM/DPL/2024 tanggal 21 September 2024. Maka mohon kiranya untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (**Zulkifli bin Sudirman**) dengan Pemohon II (**Elsa Selvianti binti Sudirman**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2022 di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tengah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara /Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2024;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia mulai tanggal 04 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jamaluddin bin Tahir**, NIK. 7406190506780001, tempat dan tanggal lahir Pomala, 05 Juni 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2022 menurut Agama Islam di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suhardiman;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Jamaluddin dan Bapak Pala, dengan mas kawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai, serta terjadi ijab kabul;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleandro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana dan samapai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Selvianti binti Sudirman**, NIK. 7406197101020001, tempat dan tanggal lahir Poleandro, 31 Januari 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2022 menurut Agama Islam di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleondro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Kandung Pemohon II bernama Suhardiman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Jamaluddin dan Pala, dengan mas kawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai, serta terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Poleandro Selatan, Desa Poleandro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana dan samapai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 04 Oktober 2024 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Poleandro Selatan, Desa Poleandro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suhardiman dengan mas kawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak Jamaluddin dan Pala, dan terjadi ijab kabul, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan hal tersebut para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022 di Dusun Poleandro Selatan, Desa Poleandro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Jamaluddin bin Tahir** dan **Selvianti binti Sudirman**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleandro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suhardiman dengan mas kawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Jamaluddin dan Pala, serta terjadi ijab kabul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, dan keduanya hingga saat ini beragama Islam;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Poleondro Selatan, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, belum dikaruniai keturunan, dan keduanya beragama Islam;
6. Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Poleondro Selatan, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022 menurut Agama Islam di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleandro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Rumbia saat ini belum memenuhi untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Rmb, tanggal 02 Oktober 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zulkifli bin Sudirman) dengan Pemohon II (Elsa Selvianti binti Sudirman) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022, menurut agama Islam di Dusun Poleondro Selatan, Desa Poleandro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Syafardin Jumain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Syafardin Jumain, S.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)